

Analisis implementasi kebijakan penggunaan virtual office sebagai tempat pengukuhan pengusaha kena pajak = The policy implementation analysis of the use of virtual offices as a place of confirmation of taxable enterprises

Hanifati Ekacintya Shabrina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20522819&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan penggunaan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pengajuan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang dan implementasi kebijakan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan sehubungan dengan implementasi kebijakan ini dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang ditetapkannya kebijakan ini adalah mendukung kemudahan dalam melakukan usaha (ease of doing business) dan memperluas basis data perpajakan di Indonesia. Implementasi kebijakan ini dapat dikategorikan berhasil karena isi kebijakan dan lingkungan implementasi mendukung, tetapi dengan catatan sumber informasi kurang mengakomodasi kebutuhan implementasi dengan adanya ketidaksesuaian definisi virtual office yang dipersamakan dan kriteria kondisi pengelola virtual office terpenuhi sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

.....This study describes the implementation of the policy of using a virtual office as a place of confirmation of a taxable enterprise in applying for the inauguration of a taxable enterprise. This study aims to analyze the background and implementation of virtual office policies as a place of inauguration of the taxable enterprise. This study uses the post-positivist paradigm with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the background for the establishment of this policy is to support the ease of doing business and to expand the taxation database in Indonesia. The implementation of this policy can be categorized as successful because the contents of the policy and the implementation environment are supportive, but with a note that the sources of information do not accommodate the implementation needs due to the discrepancy in the definition of the virtual office being equated and the criteria for the condition that a virtual office provider could be used as a place of inauguration of a taxable enterprise.